INKUNABULA
Journal of Library Science and Islamic Information
E-ISSN: 2829-9531 | P-ISSN: 2829-9507
Journal homepage: https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/inkunabula

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penguatan Perpustakaan Desa Berbasis Multiple Case di Jawa

Rani Auliawati Rachman

Ilmu Perpustakaan, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Jl. Ambarawa No.5 Gedung D14-18, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: rani.rachman.fs@um.ac.id (Corresponding author)

KATA KUNCI

Perpustakaan Desa
Kepemimpinan Desa
Pengembangan Literasi
Pemberdayaan Perpustakaan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran penting kepala desa dalam penguatan perpustakaan desa yang berkelanjutan secara sosial. Penelitian ini menyoroti bagaimana kepala desa berperan sebagai penggerak fasilitator dalam solidaritas masyarakat, pembuat kebijakan strategis dalam pengembangan literasi, pengembang infrastruktur, serta pemimpin transformatif yang aktif melibatkan generasi muda. Dengan pendekatan studi kasus ganda dalam penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan kepala desa dan pengelola perpustakaan di tiga perpustakaan desa yang berada di Jawa. Analisis tematik lintas-kasus digunakan untuk mengidentifikasi tantangan, keberhasilan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan perpustakaan desa di berbagai konteks sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran kunci dalam meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan membangun rasa kebersamaan yang kuat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program literasi. Keputusan strategis yang diambil juga berkontribusi pada keberlanjutan perpustakaan desa melalui dukungan pendanaan dan kebijakan yang berpihak pada literasi. Selain itu, keterlibatan kepala desa dalam pengembangan infrastruktur memastikan perpustakaan menjadi ruang yang nyaman dan fungsional sebagai pusat pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Yang tidak kalah penting, kepemimpinan kepala desa khususnya dalam merangkul generasi muda, memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Penelitian ini memberikan wawasan yang cukup mendalam, namun cakupannya masih terbatas pada wilayah tertentu dan belum mengkaji dampak jangka panjang kepemimpinan kepala desa terhadap pengembangan literasi. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu melihat peran perpustakaan desa dalam konteks kebijakan yang lebih luas serta mempertimbangkan studi jangka panjang untuk menilai keberlanjutan dan efektivitasnya. Temuan ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi kepala desa agar lebih optimal dalam mendukung dan mengembangkan perpustakaan desa. Penguatan kebijakan serta peningkatan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat semakin memperkuat upaya literasi dan pemberdayaan komunitas di tingkat lokal.

KEYWORDS

Village Libraries
Village Leadership
Literacy Development
Community Empowerment

ABSTRACT

This study examines the pivotal role of village heads in strengthening socially sustainable village libraries. It highlights how village heads act as facilitators of community solidarity, strategic policymakers in literacy development, infrastructure developers, and transformative leaders who actively engage younger generations. Employing a qualitative multiple-case study approach, data were collected through in-depth interviews with village heads and library managers in three village libraries across Java. A cross-

© the Author(s) 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
https://doi.org/10.24239/inkunabula.v4i2.4298
Received 19 August 2025; Received in revised form 01 September 2025; Accepted 05 September 2025
Available online 09 September 2025

case thematic analysis was conducted to identify challenges, successes, and best practices in managing village libraries within diverse social and cultural contexts. The findings reveal that village heads play a crucial role in advancing community literacy and well-being. By fostering a strong sense of togetherness, they encourage active community participation in literacy programs. Their strategic decisions further contribute to the sustainability of village libraries through financial support and literacy-oriented policies. In addition, the involvement of village heads in infrastructure development ensures that libraries function as comfortable and inclusive spaces for learning and knowledge-sharing. Equally important, their leadership in embracing youth participation strengthens the role of libraries as centers of innovation and lifelong learning. While this research provides valuable insights, its scope remains limited to certain regions and does not address the long-term impacts of village head leadership on literacy development. Future studies are therefore needed to examine village libraries within broader policy frameworks and to consider longitudinal approaches for evaluating sustainability and effectiveness. The study also offers practical recommendations for village heads to optimize their support and initiatives in strengthening village libraries. Reinforced policies and greater community engagement are expected to enhance local literacy efforts and contribute to community empowerment at the grassroots level.

How to Cite this Article: Rachman, R. (2025). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penguatan Perpustakaan Desa Berbasis Multiple Case di Jawa . *Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information*, 4(2). https://doi.org/10.24239/inkunabula.v4i2.4298

1. Pendahuluan

Perpustakaan pada tingkatan desa memiliki peran dalam mendukung pembangunan komunitas. Salah satu caranya dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, dan mengembangkan modal sosial (Heuertz, 2009), dengan meningkatkan modal inteklektual dan sosial masyarakat, perpustakaan desa dapat mendukung pembangunan komunitas dan mendorong pemberdayaan serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (Annan-Prah & Andoh, 2023). Pemanfaatan perpustakaan desa dalam mendukung pembangunan komunitas perlu dikelola dengan baik sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan perpustakaan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas dan koleksi buku, faktor lain yang dapat memberikan peranan penting yaitu peran dari pimpinan tertinggi di tingkat desa, yaitu kepala desa sebagai pengambil keputusan. Kepala desa yang aktif ikut serta dalam mengembangkan perpustakaan desa dan menjadikan penngembangan perpustakan desa sebagai salah satu program prioritas dalam agenda pembangunan desa berdasarkan studi, membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya edukasi, hal ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan anggaran dapat berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan perpustakaan (Dani & Mu'aimanah, 2024).

Penelitian lain terkait peran kepala desa juga disebutkan oleh (Park et al., 2024) bahwa kepemimpinan desa yang efektif dapat memanfaatkan konsep "power with" dan power to" untuk membantu dalam menjalankan aksi kolektif serta penguatan kapasitas individu, sehingga mampu mentransformasi dinamika sosial desa (Park et al., 2024). Penerapan kepemimpinan kolaboratif dapat menjadi salah satu kunci untuk membuka potensi dan mendorong partisipasi beragam angota masyarakat desa dalam program literasi dan mendukung pemanfaatan sumber daya lokal untuk menjaga keberlanjutan. Kepemimpinan kolaboratif yang dilakukan oleh kepala desa tidak hanya memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, akan tetapi juga menjadikan perpustakaan desa sebagai ruang publik inklusif yang dapat berperan dalam membangun modal sosial, memperluas literasi, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Selain penelitian yang telah disebutkan, model kepemimpinan kolaboratif dapat juga dilihat pada beberapa perpustakaan desa yang berkembang karena dukungan langsung kepala desa, yaitu Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Perpustakaan Desa Muda Bhakti di Magelang, Jawa Tengah, dan Perpustakaan Pabukon Saba

di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Keberhasilan ketiga perpustakaan ini menunjukkan bahwa dukungan kepemimpinan lokal, terutama kepala desa, sangat membantu dalam penguatan dan pengembangan perpustakaan desa yang berkelanjutan.

Pembahasan terkait peran kepala desa menjadi penting, kepala desa sebagai pemimpin memiliki otoritas untuk membuat kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memanfaatkan asset desa seperti lahan dan anggaran guna mendukung pengembangan perpustakaan, selain itu, kepala desa juga memiliki jaringan sosial yang dapat menjadi modal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjalin Kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung perpustakaan desa (Che & Mbah, 2021; Veselicz et al., 2022). Namun, pembahasan terkait peran kepala desa sebagai pembuat kebijakan dalam memastikan keberlanjutan perpustakaan desa belum sepenuhnya terstruktur dan menajadi salah satu prioritas yang dilakukan. Pada banyak praktek dilapangan, masih banyak perpustakaan desa yang bergantung pada inisiatif individu atau bantuan eksternal tanpa membuat strategi yang berkelanjutan dari pemerintah desa. Sehingga, perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana kepala desa dapat memanfaatkan perpustakaan desa sebagai pendekatan untuk pembangunan desa yang strategis.

Artikel ini berfokus untuk memahami strategi yang digunakan kepala desa pada tiga desa yang dijelaskan di atas dalam mendukung perpustakaan desa, seperti dalam hal perencanaan, pendanaan, pengelolaan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pihak eksternal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai kempimpinan kepala desa dalam memperkuat peran perpustakaan desa sebagai pusat ruang berkegiat atau pemberdayaan masyarakat. Selain itu, temuan hasil penelitian juga dapat menjadi dasar bagi perumus kebijakan ataupun pemerintah desa yang lebih mendukung keberlanjutan perpustakaan desa sebagai bagian dari pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa merupakan salah satu jenis perpustakaan yang berada di tingkat desa yang dalam pelaksanaannya menajdi pendukung dalam kegiatan masyarakat desa, khususnya pada kegiatan literasi, Pendidikan dan kegiatan komunitas masyarakat. Perpustakaan Desa adalah lembaga layanan publik yang berada di desa. Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat tersebut, dengan tujuan untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat (Sutarno, 2008, p. 9).

Konsep perpustakaan desa tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyedia koleksi bacaan, akan tetapi memiliki peranan yang lebih luas dalam kehidupan sosial masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Griffis & Johnson, 2014) menyampaikan bahwa perpustakaan yang berada di wilayah pedesaan dipandang sebagai salah satu pusat interaksi sosial dan informasi bagi masyarakat desa, baik pendatang baru maupun kelompok minoritas, perpustakaan desa menjadi symbol identitas lokal, sarana penguatan partisipasi dan kemandirian warga desa, serta penopang jaringan yang lebih luas antara ruang komunitas dan masyarakat. \

Dengan demikian, perpustakaan desa yang dianggap sebagai tempat penyimpanan buku sudah lama ditinggalkan, hal ini juga disampaikan oleh (Lutfiyana et al., 2022) yang menyatakan bahwa perpustakaan desa harus berbasis masyarakat, berfungsi sebagai sarana belajar, mendukung Pendidikan, serta menjadi salah satu bagian integral dari pembangunan desa yang berkelanjutan. Perpustakaan desa sebagai pusat pembelajaran dan kegiatan mendorong partisipasi aktif masyarakat sehingga mampu mengembangkan kemampuan literasi masyarakat desa.

2.2. Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Perpustakaan Desa

Kepala desa sebagai pemegang peranan sentral dalam pemerintah desa memiliki tugas untuk mendukung pengembangan berbagai aspek di lingkungan desa, termasuk dalam pengembangan perpustakaan desa. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh kepala desa dalam mendukung pengembangan perpustakaan desa yaitu:

2.2.1. Penyediaan akses dan infrastruktur, yang pertama kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan insfrastruktur yang memadai untuk pengembangan perpustakaan desa, seperti contohnya memastikan bangunan fisik perpustakaan dalam kondisi baik, menyediakan fasilitas yang memadai untuk operasional maupun kegiatan perpustakaan.

2.2.2. Bantuan anggaran dana, pendanaan untuk perpustakaan desa juga menjadi salah satu tanggung jawab kepala desa yang harus aktif menggalang dana baik dari anggaran desa ataupun sumber ekternal seperti dari pemerintah kabupaten, provinsi atau organisasi non-pemerintah, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan pengadaan buku dan fasilitas yang diperlukan perpustakaan desa terpenuhi. (Hilmawan et al., 2023).

2.2.3. Mendukung peningkatan literasi dan Pendidikan, perpustakaan desa dapat menjadi pendukung dalam pembangunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan literasi dan Pendidikan masyarakat desa, sehingga kepala desa perlu melihat perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan membantu dalam menyediakan bacaan yang relevan dan program literasi yang dapat berfungsi sebagai basis pengetahuan yang berkelanjutan.

2.2.4. Menjadi penghubung dalam Kerjasama dengan pihak lain, kepala desa memiliki jaringan yang lebih luas, untuk itu kepala desa dapat membantu membangun kemitraan dengan lembaga lai seperti lembaga Pendidikan, LSM, dan badan pemerintah untuk mendukung dalam pelaksanaan program di perpustakaan desa, seperti kegiatan membaca, pelatihan teknologi, dan kegiatan komunitas lainnya (Adesipo et al., 2020; Zhang & Zhang, 2020).

Keterlibatan kepala desa dalam memainkan peran aktif dalam aspek-aspek tersebut dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pengetahuan masyarakat yang nantinya akan memberikan dampak dalam mendukung pengembangan desa secara keseluruhan.

3. Metodologi Penelitian

Pada artikel ini, pendekatan studi kasus majemuk (*multiple case study*) digunakan untuk memahami secara mendalam peran kepala desa pada masing-masing desa dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan perpustakaan desa yang menerapkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pendekatan ini dipilih agar mendapat data yang mendalam dari berbagai narasumber yang berasal dari beberapa kasus (Yin, 2018). Studi kasus majemuk (*multiple case study*) juga memungkinkan untuk melakukan perbandingan lintas kasus sehingga dapat membantu mengklarifikasi apakah hasil temuan hanya berlaku pada satu kasus tertenu atau dapat digeneralisasikan dengan kasus yang lain (Yin, 2003). Metodelogi ini dapat membantu mengidentifikasikan strategi atau kebijakan kepala desa yang mempengaruhi pengelolaan perpustakaan desa, melalui analisis data yang dilakukan secara mendalam pada masing-masing perpustakaan desa (Eisenhardt, 1989; Yin, 2018).

Penelitian ini dilakukan pada tiga desa yang ada di pulau Jawa, yang telah mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu: perpustakaaan Desa Gampingan Gemar Membaca (Kabupaten Malang, Jawa Timur), Perpustakaan Desa Muda Bhakti (Kabupaten Magelang, Jawa Tengah), Perpustakaan Desa Margamukti (Pangalengan Bandung, Jawa Barat).

Pemilihan desa dilakukan secara purposive dengan menentukan beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki perpustakaan desa yang aktif dan berkelanjutan, (2) Pemerintah desa mendukung dalam pengelolaan perpustakaan desa. Pengumpulan data pada artikel ini menggabungkan berbabagai sumber data (Denzin, 2017) dengan melakukan pengumpulan data melalui: (1) wawancara dengan 6 narasumber yang terdiri dari masing-masing kepala desa dan pengelola di 3 perpustakaan desa, (2) observasi langsung terhadap aktivitas perpustakaan dan keterlibatan kepala desa dalam mendukung kegiatan perpustakaan desa, (3) dokumentasi dan data sekunder. Kegiatan wawancara direkam, ditranskripsikan dan dianalsis untuk mengidentifikasi peran kepala desa dalam mendukung pengelolaan perpustakaan desa.

Data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari hasil pengumpulan data dilapangan pada tahun 2019 dan 2020, sehingga temuan dalam penelitian ini merefleksikan kondisi perpustakaan desa serta kebijakan desa pada periode tersebut.

Analisis data dilakukan berdasarkan Teknik pengkodean yang dikembangkan oleh (Corbin & Strauss, 2015). Tahapan analisis dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi peran kepala desa dalam pengelolaan kepala desa. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap dengan tahap pertama dimulai dengan pengkodean terbuka (*open coding*), dalam tahap ini transkip wawancara dan catatan observasi dibaca secara berulang untuk kemudian diidentifikasi konsep-konsep utama yang muncul dari data. Tahapan berlanjut pada tahapan pengodean aksial (Axial coding), kategori yang telah diidentifikasi dalam pengodean terbuka dikelompokkan berdasatkan hubungan sebab-akibat dan keterkaitan antar konsep, pada tahapan ini penulis melakukan analisis mendalam. Tahapan terakhir pada analisis data dilakukan pengodean selektif (selective coding), yang bertujuan menginstegrasikan kategori utama dalam satu kerangka konseptual untuk menjelaskan pola hubungan antar temuan penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Perpustakaan Desa

4.1.1. Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca

Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca merupakan salah satu perpustakaan desa yang berada di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perpustakaan ini berdiri pada tahun 2015. Lokasi perpustakaan pada awal berdiri berada memanfaatkan ruangan kecil yang ada di balai desa Gampingan sebagai ruang perpustakaan, melihat banyak peminat yang datang maka Kepala Desa Gampingan mendukung dengan memberikan ruangan yang lebih besar dan terpisah dari kegiatan karang taruna. Pada tahun 2017, kepala desa gampingan menyediakan Gedung khusus untuk perpustakaan desa yang diresmikan oleh Camat Pagak pada September 2017. Gedung perpustakaan berdiri di atas lahan seluas 199 meter persegi dengan bagunan dua lantai yang berlokasi strategis di pinggir jalan Raya Gampingan.

4.1.2. Perpustakaan Desa Muda Bhakti

Perpustakaan Desa Muda Bhakti yang berlokasi di Desa Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah didirikan pada tahun 2000 oleh Endah Susanti dengan tujuan memberikan wadah untuk masyarakat mengisi waktu luang secara bermanfaat. Perpustakaan berkembang pesat di bawah pengelolaan pak Muhadi, pada tahun 2010 perpustakaan sempat vakum akibat bencana erupsi Gunung Merapi dan Kembali aktif pada tahun 2016 yang diresmikan oleh Kepala Desa Ngablak dengan merubah nama perpustakaan yang sebelumnya Karang Taruna Muda Bhakti menjadi Perpustakaan Muda Bhakti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 180.192/18/Kep/2016 dengan meresmikan pengurus baru melalui karang taruna serta Forum Anak Desa Ngablak BANANA (Barisan Anak-anak Ngablak).

4.1.3. Perpustakaan Desa Pabukon Saba

Perpustakaan desa Pabukon Saba berada di Desa Maramukti berasal dari Bahasa Sunda yang memiliki arti Pabukon berarti tempat untuk menyimpan bahan Pustaka, Saba berarti dinamis atau bergerak. Perpustakaan ini berdiri sejak tahun 2007, kemudian pada tahun 2009 perpustakaan ini diresmikan berdasarkan SK Kepala Desa No. 040/SK.8/I/2009, namun pada tahun 2009 gempa 7,2 skala Richter menguncang Pangalengan dan merusak perpustakaan, selain itu pada tahun 2010 perpustakaan juga terkena musibah banjir bandang yang membuat perpustakaan mengungsi ke komplek kantor desa. Pada tahun 2013 kepala desa Margamukti membantu membangun Gedung perpustakaan.

4.2. Peran Strategis Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Desa

Kepala Desa memiliki peranan penting dalam mendukung pengelolaan perpustakaan desa, sebagai salah satu upaya dalam mendukung pembangunan komunitas. Berikut merupakan hasil wawancara dan juga analisis temuan mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan perpustakaan desa**,** yang mencakup berbagai inisiatif dan kebijakan yang telah diterapkan untuk mendukung keberlangsungan serta pengembangan perpustakaan desa.

Table 1.
Rangkuman Hasil Wawancara Kepala Desa dan Pengelola Perpustakaan

Kategori	Temuan Utama	Pernyataan Responden
Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa	Kepala desa berperan sebagai fasilitator dalam membangun solidaritas antara komunitas dan perangkat desa untuk mendukung perpustakaan desa.	*"Kalau dari saya berusaha merangkul mba, jadi komunitas yang ada terus ngajak perangkat desa yang lain untuk aktif di perpustakaan, berusaha menjaga kekompakkan gitu alhamdulillah kita kompak sama-sama terus sampai selamanya."* (Kepala Desa A)
	Perpustakaan desa dijadikan solusi untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah dengan keterbatasan fasilitas sekolah.	*"Kalau dulu ada di visi misi saya itu mencerdaskan dan fokus pada pendidikan, jadi waktu saya menjabat di awal akses ke sekolah itu terbatas dan jauh mba, nah kalau mau bangun sekolah kan tidak memungkinkan jadi salah satunya mendirikan perpustakaan desa."* (Kepala Desa B)
	Pembangunan perpustakaan menjadi bagian dari visi kepala desa untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya generasi muda.	*"Begitu saya menjabat saya langsung ke Pak Sam, bahkan dulu ketika itu belum dibangun, kita bercita-cita untuk membangun gedung perpustakaan di sini dulu itu karena kepedulian kita terhadap peningkatan SDM di masyarakat desa."* (Kepala Desa C)
	Perpustakaan desa dibangun sebagai bagian dari visi misi kepala desa dan terintegrasi dengan program desa lainnya seperti BUMDes dan PKK.	*"Masuk ke dalam visi misinya Ibu dulu waktu mencalonkan, jadi tidak berdiri sendiri mbak, kebanyakan kalau di desa lain itu perpustakaannya mendirikan awal sendiri baru minta izin ke pemerintah desa, kalau kita di sini awal itu ya wes bareng dari awal."* (Pengelola Perpustakaan Desa A)
	Kepala desa menerapkan pendekatan inklusif dengan melibatkan generasi muda dalam pengelolaan perpustakaan desa.	*"Pak kadesnya itu berbaur sama yang muda soalnya gimana ya pengurusnya kan rata-rata masih muda-muda semua."* (Pengelola Perpustakaan Desa B)
	Kepala desa berperan aktif dalam mendukung perpustakaan dengan mengalokasikan anggaran serta menghadiri kegiatan perpustakaan desa.	*"Kalau sejauh ini mendukung, memberikan bantuan dana pembangunan gedung, kalau ada kegiatan di perpustakaan desa juga datang."* (Pengelola Perpustakaan Desa C)

Sumber: Olahan penulis, 2025

Peran Kepala Desa dalam mendukung perpustakaan desa berdasarkan hasil wawancara dan observasi, memiliki beberapa peran, Kepala Desa A (Perpustakaan Gampingan Gemar Membaca) memiliki peran sebagai fasilitator yang berusaha membangun solidaritas antara komunitas yang ada di desa, perangkatat desa dan juga perpustakaan desa, Kepala Desa B

(Perpustakaan Desa Muda Bhakti berperan dalam meningkatkan Pendidikan dengan melakukan pembangunan perpustakaan desa yang kala itu akses sekolah dan Pendidikan terbatas. Sementara Kepala Desa C (Perpustakaan Desa Pabukon Saba) mendukung perpustakaan desa sebagai salah satu akses untuk peningkatan SDM desa dengan mengintegrasikan perpustakaan ke dalam program kegiatan desa.

Kepala Desa memiliki peranan penting dalam mendukung pengelolaan perpustakaan desa, sebagai salah satu upaya dalam mendukung pembangunan komunitas. Peran pertama yang dapat dilakukan oleh kepala desa adalah sebagai fasilitator, sebagaimana yang dilakukan oleh Kepala Desa A (Perpustakaan Gampingan Gemar Membaca), yang menekankan untuk menjalin solidaritas antara komunitas yang ada di desa, perangkat desa dan pengelola perpustakaan desa guna mendukung keberlanjutan perpustakaan, peran perpustakaan tersebut sejalan dengan konsep *community development* yang menekankan pentingnya *social capital* dalam mendukung keberlanjutan program masyarakat (Ife, 2010). Penitngnya membangun solidaritas dan keterlibatan komunitas untuk mendukung kegiatan di perpustakaan juga dilakukan dalam studi di Haiti, pada studi tersebut dijelaskan bahwa pemimpin lokal mengorganisir kegiatan bulanan anti-malaria dengan partisipasi masyarakat yang tinggi (Bardosh et al., 2023). Hal ini membuktikan bahwa, kepala desa memiliki peran sebagai fasilitator untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk dalam kegiatan yang ada di perpustakaan.

Peran Kepala Desa yang kedua, sebagai perencana kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia. Komunitas pedesaan dan masyarakat kurang mampu sering menghadapi tantangan dalam mengakases pendidikan berkualitas akibat keterbatasan sumber daya infrastruktur (Heather D Hutto, 2023; Sharma et al., 2020), hal inilah yang terjadi pada desa Ngablak. Berdasarkan hasil waancara perpustakaan desa Muda Bhakti , pada tahun 2016 didirikan sebagai salah satu pendukung untuk akses pendidikan yang pada waktu itu sangat jarang, sehingga Kepala Desa B (Perpustakaan Desa Muda Bhakti) membuat kebijakan yang sesuai dengan visi misi ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa, membangun perpustakaan desa sebagai salah satu akses pendidikan gratis. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh Kepala Desa C (Perpustakaan Desa Pabukon Saba) yang juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui perpustakaan desa dan juga sejalan dengan visi misi ketika berkampanye untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda. Kebijakan penyediaan perpustakaan sebagai akses Pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan generasi muda mencerminkan pendekatan *participatory leadership* menurut (Arnstein, 1969) dari kepala desa, karena melibatkan generasi muda sebagai pengelola dan bagian dari penguatan literasi masyarakat desa.

Keterlibatan kepala desa dalam pengelolaan perpustakaan tidak hanya sekadar kebijakan teknis, akan tetapi sebagai salah satu strategi inklusi sosial, bahwa perpustakaan dapat menjadi ruang inklusif untuk belajar, berjejaring, dan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagaimana yang dijelasakan dalam konsep *social inclusion through libraries* (Aabø & Audunson, 2012). Perpustakaan desa yang dalam pelaksanaanya dikelola dengan baik tidak lepas dari peran dan dukungan kepala desa yang memiliki kesadaran bahwa pengetahuan adalah kekuatan, Kepala Desa menyadari bahwa perpustakaan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan masayrakat desa, dengan melibatkan berbagai pihak, memberikan kesadaran pentingnya perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kepala desa mengambil peran memastikan bahwa perpustakaan menjadi pusat kegiatan literasi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.3. Strategi Pendanaan, Sumber Daya dan Kolaborasi untuk Perpustakaan Desa

Pendanaan, sumber daya dan kolaborasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perpustakaan desa berkelanjutan. Pembahasan pada bagian ini menyoroti beragam strategi pendanaan, pengelolaan sumber daya dan kolaborasi yang telah dilakukan oleh ketiga perpustakaan desa. Pembahasan pertama terkait strategi pendanaan perpustakaan desa, yang mencakup bagaimana peran dan kebijakan kepala desa terkait anggaran untuk perpustakaan desa dan bagaimana perpustakaan memperoleh anggaran.

Table 2.
Rangkuman Hasil Wawancara Kepala Desa dan Pengelola Perpustakaan (Pendanaan)

Kategori	Temuan Utama	Pernyataan Responden
Strategi Pendanaan Perpustakaan Desa	Pendanaan perpustakaan desa bersumber dari anggaran dana desa dan donasi pribadi, dengan alokasi untuk pembangunan serta kegiatan perpustakaan desa.	*"Kebetulan kalau donator untuk perpustakaan ini suami saya, itu kepala desa yang lama, dua kali abah baru ibu tinggal melanjutkan, selain itu juga dari anggaran desa biasanya kalau untuk kegiatan atau bayar yang jaga perpus ini mba."* (Kepala Desa A)
	Kepala desa berkomitmen untuk mengalokasikan dana desa secara rutin setiap tahun bagi perpustakaan.	*"Kalau untuk anggaran saya sudah berkomitmen dari awal kampanye itu setiap tahun menganggarkan dana desa untuk kegiatan di perpustakaan desa."* (Kepala Desa B)
	Pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk operasional perpustakaan seperti insentif petugas layanan.	*"Operasional, walaupun jumlahnya tidak seberapa, terutama ke petugas layanan yang berjaga di perpustakaan itu diambilkan dari anggaran desa."* (Kepala Desa C)
	Pendanaan perpustakaan desa didukung oleh kombinasi anggaran desa dan kontribusi masyarakat dari hasil pertanian (Salak Pustaka) serta sedekah buku.	*"Dari yang salak itu, yang satu petani salak menghibahkan satu pohon salaknya untuk perpusdes, terus dari anggaran dana desa juga. Kalau dari buku itu kan kita ada namanya sedekah buku, satu KK satu buku, tapi sering yang datang malah satu kardus."* (Pengelola Perpustakaan Desa B)
	Pendanaan perpustakaan desa bersumber dari dana desa, CSR, dan pendapatan mandiri melalui café literasi.	*"Kita anggaran terbesar dari CSR Star Energy Biopharma tiap tahun ngasih bantuan uang, dari dana desa, dan juga dari hasil café literasi ini."* (Pengelola Perpustakaan Desa C)

Sumber: Olahan penulis, 2025

Pendanaan atau anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam operasional perpustakaan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari tiga Kepala Desa memiliki kebijakan untuk menganggarkan dana desa untuk mendukung perpustakaan desa. Kepala Desa A (Perpustakaan Gampingan Gemar Membaca) setiap tahun menggarkan dana desa untuk operasional dan juga insentif, dan juga dari dana pribadi kepala desa yang sebelumnya. Sedangkan Kepala Desa B (Perpustakaan Desa Muda Bhakti) memiliki komitmen untuk menganggarkan dana desa untuk keperluan perpustakaan, selain itu, Kepala Desa juga membuat kebijakan untuk petani salak agar menghibahkan satu pohon salak untuk perpustakaan. Kepala Desa C membantu menggarkan dalam operasional perpustakaan dan insentif pengelola, serta pada perpustakaan B mendapatkan pendanaan dari CSR dan juga café literasi. Komitmen kepala desa dalam mengalokasikan dana tahunan juga menjadi faktor penting dalam keberlangsungan perpustakaan desa. Pendanaan perpustakaan yang dilakukan oleh ketiga perpustakaan dess sejalan dengan konsep *community-based resource mobilization* dan yang menekankan pentingnya kontribusi lokal untuk keberlanjutan, sekaligus memperkuat pandangan bahwa organisasi dapat berkembang melalui hubungan simbiosis dengan pihak

eksternal, termasuk perusahaan yang menjalankan program CSR (Clarke et al., 2023; Murray et al., 2020).

Selanjutnya bagian ini menjelaskan hasil wawancara dan analisis temuan terkait dukungan sumber daya untuk perpustakaan, sejauh mana perpustakaan desa dapat berfungsi optimal, bagian ini menyajikan data mengenai berbagai bentuk dukungan yang diberikan dalam sarana dan prasarana.

Table 3.
Rangkuman Hasil Wawancara Kepala Desa dan Pengelola Perpustakaan (sumber daya)

Kategori	Temuan Utama	Pernyataan Responden
Dukungan Sumber Daya untuk Perpustakaan Desa	Pembangunan perpustakaan desa didukung oleh aset pribadi keluarga kepala desa sebelumnya.	*"Kalau kami, gedung perpustakaan ini kebetulan punya keluarga suami saya mba, kepala desa sebelumnya."* (Kepala Desa A)
	Pengembangan perpustakaan dilakukan secara bertahap, mulai dari pelatihan, pembangunan gedung, hingga peningkatan koleksi buku melalui berbagai strategi.	*Kami menganggarkan 25 juta untuk buku, dari kegiatan lomba dan sosialisasi, akhirnya Perpusnas mulai melirik ke sini."* (Kepala Desa B)
	Pembangunan gedung perpustakaan desa merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah desa dan inisiatif pengelola perpustakaan.	*"Kami bantu untuk pembangunan gedung perpustakaan jadi dua lantai, tapi kami bantu yang lantai bawah, kalau lantai atas itu inisiatif ketua pengelolanya."* (Kepala Desa C)

Sumber: Olahan penulis, 2025

Dukungan sumber daya menjadi salah satu kunci perpustakaan desa dapat melanjutkan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan hasil bahwa sumber daya yang diterima oleh perpustakaan desa baik dari kepala desa ataupun sumbangan pribadi mencakup beberapa aspek, seperti gedung perpustakaan, bantuan pembangunan Gedung, sarana dan prasrana, kebijakan untuk pemberian insentif kepada pengurus perpustakaan.

Terakhir, bagian ini menjelaskan hasil wawancara dan analisis temuan terkait kolaborasi dengan pihak eksternal yang merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat peran perpustakaan desa sebagai ruang berkegiat masyarakat. Pada bagian ini menyajikan data mengenai berbagai bentuk kolaborasi yang dilakukan perpustakaan desa dengan pihak eksternal.

Table 4.
Rangkuman Hasil Wawancara Kepala Desa dan Pengelola Perpustakaan (Kolaborasi)

Kategori	Temuan Utama	Pernyataan Responden
Kolaborasi dengan Pihak Eksternal	Kepala desa dan pengelola perpustakaan desa membangun jaringan dengan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kabupaten.	*"Tapi kita itu kan memang harus dekat dengan orang-orang dinas, dengan kecamatan, orang-orang yang ada di kabupaten, kita memang semuanya dekat punya kenalan di sana."* (Kepala Desa A)
	Perpustakaan desa membangun kerja sama strategis dengan	*"Kalau kerjasamanya kebanyakan contohnya kalau kita mau bikin*

	berbagai pihak untuk mendukung kegiatan literasi dan layanan perpustakaan keliling.	*kegiatan perlu narasumber kan kita misal kegiatan tentang kayak pelatihan kebencanaan ya udah kita ke BMKG gitu ngajak kerjasama gitu butuh narsumber, Kita juga ada MOU sama kelompok Tani buat pinjam tosanya buat perpustakaan keliling."* (Pengelola Perpustakaan B)
	Perpustakaan desa mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun komunitas lokal.	*"Kalau dari luar itu kita ada dari CSR itu dari Star energy bioparma, terus sama dinas perpustakaan, dinas peternakan, dinas perpustakaan juga, Sekolah yang ada di sekitar sini, kalau dari desa sendiri sama ibu-ibu PKK dan karang taruna"* (Pengelola Perpustkaan C)

Sumber: Olahan penulis, 2025

Perpustakaan tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, maka perlu dilakukan kolaborasi sehingga dapat mendukung perpustakaan desa menjadi pusat literasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Masing-masing perpustakaan desa berdasarkan hasil wawancara menjelaskan telah melakukan kolaborasi baik dengan komunitas desa, lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Kolaborasi dilakukan dalam hal bantuan dana, kegiatan pelatihan dan narasumber serta bantuan fasilitas.

Pendanaan menjadi salah satu faktor penting agar perpustakaan dapat terus melanjutkan aktivitasnya. Di Indonesia, desa diberikan wewenang atau otonomi sendiri dalam mengatur sumber daya keuangan desa yang dapat digunakan untuk berinvestasi pada infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (Rammohan & Tohari, 2023), maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur anggaran desa masing-masing, dan pada Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019, dijelaskan bahwa dana desa dari pemerintah tiap tahunnya dapat dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan desa dan pengadaan bahan baca. Namun, ketentuan ini belum banyak di terapkan oleh beberapa kepala desa. Berdasarkan hasil wawncara pada tiga kepala desa pada artikel ini, Kepala Desa A, B dan C menjelaskan bahwa perpustakaan desa di dukung oleh anggaran desa. Alokasi dana desa yang di anggarkan oleh masing-masing kepala desa menjadi dua, yang pertama dana desa di alokasikan pada pembangunan fisik perpustakaan dan yang kedua dana desa di alokasikan pada kegiatan operasional perpustakaan, seperti; anggaran untuk kegiatan pelatihan, anggaran untuk pembelian koleksi buku, serta anggaran untuk insentif pengurus perpustakaan.

Selain dari anggaran desa, untuk keberlanjutan perpustakaan desa juga mendapat dukungan dari masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas dan kemitraan menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pada perpustakaan lokal. Keterlibatan dan pemberdayaan komunitas dapat memastikan keberlangsungan jangka Panjang (Sejie & Mahomed, 2023). Ketiga perpustakaan desa juga melakukan hal yang sama, walaupun mendapat anggaran desa namun masih terbatas, maka seperti yang dilakukan oleh perpustakaan desa B yang memanfaatkan kontribusi dari masyarakat dengan mendapat hibah satu pohon salak yang disebut dengan program "salak Pustaka".

Angagran untuk perpustakaan juga dapat berasal dari lembaga swasta atau bisnis, seperti halnya suatu perusahaan. Inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi pendanaan perpustakaan desa. Bermitra dengan perusahaan untuk mengembangkan proyek perpustakaan sebagai bagian dari program CSR dapat memberikan dukungan finansial bagi perpustakaan (Clarke et al., 2023; Sejie & Mahomed, 2023). Hal inilah yang dilakukan oleh perpustakaan desa C, perpustakaan desa C menyelaraskan kegiatan

perpustakaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pelatihan buta aksara, pemberdayaan dalam bidang pertanian labu siam, peternakan ayam sehingga menarik minat perusahaan Star energy bioparma dalam memberikan pendaan pada perpustakaan.

Selain dalam bentuk pendanaan, kolaborasi yang dilakukan dengan pihak eksternal menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh kepala desa dan perpustakan untuk keberlangsungan. Selain menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan atau dinas terkait seperti Kepala Desa A yang menjalin Kerjasama dengan dinas pariwisata untuk peningkatan wisata di daerah Gampingan dan perpustakaan sebagai ruang untuk tempat pelaksanaan latihan, Perpustakaan Desa B yang berkerjasama dengan BMKG untuk menajadi narsumber dalam hal mitigasi bencana dan juga perpustakaan B dan C yang bekerjasama dengan sekolah disekitar perpustakaan. Kolaborasi dengan pihak eksternal menajadi strategi penting dalam memperkuat peran perpustakaan, dalam hal ini mencerminkan prinsip collaborative leadership, dimana kepala desa memainkan peran penting dalam memobilisasi sumber daya masyarakat dan mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan LSM, untuk memperkuat inisiatif pembangunan. Kepemimpinan transformasional pada kepala desa memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih baik dan dapat menghasilkan capaian pembangunan yang lebih efektif (Yunas et al., 2025).

4.4. Dampak Keterlibatan Kepala Desa terhadap Keberhasilan Perpustakaan Desa

Perpustakaan Desa mungkin saja dapat menjalankan kegiatannya tanpa bantuan kepala desa, dengan adanya bantuan seperti lembaga swasta dan lembaga lainnya. Namun, kepala desa sebagai pemimpin wilayah memiliki kewenangan dalam mengalokasikan dana desa, merumuskan kebijakan, serta menggerakkan partisipasi masayarakat untuk berkontribusi dan berkegiat di perpustakaan. Kepala desa dapat membuat kebijakan untuk menggunakan beberapa persen anggaran desa untuk dialokasikan pada pengembangan koleksi buku, fasilitas, serta program literasi dan pelatihan keterampilan sehingga perpustakaan desa dapat berkembang menjadi pusat pembelajaran yang inklusif bagi masyarakat. Selain itu, komitmen kepala desa dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan perpustakaan desa mendorong partisipasi aktif masayarakat dalam memanfaatkaan layanan yang disediakan baik berupa kegiatan, sosialisasi, pelatihan keterampilan sehingga menambah wawasan dan keterampilan baru bagi masyarakat. Dengan adanya dukungan dari kepala desa serta kebijakan yang dibuat perpustakaan desa dapat lebih berkembang sehingga mampu membantu masayrakat meningkatkan kapasitas dalam bidang keterampilan, kewirausahaan, pertanian dan teknologi sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

4.5. Strategi Penguatan Perpustakaan Desa: Praktik Baik oleh Kepala Desa

Perpustakaan desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan literasi dan akses informasi bagi masayrakat desa, selain itu juga, berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial. Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya kemampuan literasi dan akses terhadap sumber informasi memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi komunitas (Jun, 2020; Lund et al., 2023). Perpustakaan memiliki peran tersebut karena perpustakan menyediakan berbagai sumber literasi, baik cetak dan digital, serta pada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial perpustakaan memfasilitasi pengembangan keterampilan masyarakat.

Untuk mencapai peran tersebut, perlu adanya dukungan dari Kepala Desa yang memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan perpustakaan dikelola dengan baik, berkelanjutan, dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan menerapkan strategi yang tepat, peprustakaan desa akan berkembang dan menjadi ruang yang tidak sekadar menyediakan informasi, tetapi juga melaksanakan kegiaatan yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar perpustakaan desa. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan perpustakaan yang (1) Kepemimpinan kolaboratif dan inklusif, dalam hal ini perpustakaan desa harus dapat berperan sebagai fasilitator dengan membangun hubungan solidaritas antar perangkat desa, komunitas, dan generasi muda dalam bersama-sama membantu perpustakaan desa. Kepala Desa yang melakukan pendekatan inklusif dengan melibatkan berbagai stakeholder akan membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif dan keberlanjutan

perpustakaan desa. (2) Integrasi perpustakaan dengan program desa, strategi ini terbukti berhasil dalam menintegrasikan kebijakan dan program kegiatan yang ada di perpustakaan, semakin bagus jika program perpustakaan atau yang berhubungan dengan edukasi menjadi salah satu visi misi kepala desa.

Straregi yang ke (3) pendanaan berkelanjutan dan kreatif, kebijakan kepala desa dalam mengalokasikan anggaran desa secara rutin atau sebagian dalam mendukung kegiatan di perpustakaan menjadi salah satu strategi efektiv dalam membantu keberlanjutan perpustakaan desa, selain itu menjalin kolaborasi antar perpustakan desa dengan pihak eksternal juga dapat membantu dalam pendanaan di perpustakaan desa, serta program kreatif seperti salak Pustaka juga dapat menajdi alternatif. (4) penyediaan infrastruktur dan sumber daya, bantuan yang dilakukan oleh kepala desa seperti dalam bentuk hibah Gedung perpustakaan, baik melalui anggaran desa ataupun inisiatif mandiri dapat membantu dalam mendukung pengelolaan perpustakaan desa, dukungan lain seperti koleksi, sarada dan prasarana, serta insentif untuk pengurus menjadi strategi yang juga dapat dilakukan oleh kepala desa.

4. Kesimpulan

Kepala Desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, dimana Kepala Desa bertindak sebagai fasilitator yang membagun solidaritas komunitas, mengajak masayrakat untuk ikut berpartisipasi serta kepala desa juga berperan sebagai pengambil kebijakan strategis yang dapat merancang regulasi dan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan perpustakaan desa. Kepala desa juga berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur perpustakaan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat serta melibatkan generasi muda menjadi kunci keberlanjutan perpusatakaan. Menjadikan perpustakaan desa tidak hanya menjadi tempat membaca tetapi juga sebagai ruang berinteraksi sosial dan berkegiat.

Namun, meskipun penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai peran Kepala Desa dalam pengelolaan perpustakan desa, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama penelitian ini masih terbatas pada wilayah tertentu sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi perpustkaan desa di begagai lokasi lain. Kedua, belum adanya eksplorasi mendalam mengenai efektivitas kebijakan Kepala Desa dalam jangka Panjang berdasarkan perspktif pengguna dan masyarakat.

Penelitian ini membuka peluang eksplorasi lebih lanjut dalam meneliti efektivitas program literasi desa dalam memberdayakan individu serta menganalisis bagaimana perpustakaan desa berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi desa. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat memperluas narsumber atau responden kepada masayrakat desa ataupun memperluas cakupan wilayahnya.

Daftar Pustaka

Aabø, S., & Audunson, R. (2012). Use of library space and the library as place. *Library and Information Science Research*, *34*(2), 138–149. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2011.06.002

Adesipo, A., Fadeyi, O., Kuca, K., Krejcar, O., Maresova, P., Selamat, A., & Adenola, M. (2020). Smart and climate-smart agricultural trends as core aspects of smart village functions. *Sensors (Switzerland)*, *20*(21), 1–22. https://doi.org/10.3390/s20215977

Annan-Prah, E. C., & Andoh, R. P. K. (2023). Effects of customised capacity building on employee engagement, empowerment, and learning in Ghanaian local government institutions. *Public Administration and Policy*, *26*(2), 228–241. https://doi.org/10.1108/PAP-06-2022-0068

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Bardosh, K., Desir, L., Jean, L., Yoss, S., Poovey, B., Nute, A., de Rochars, M. V. B., Telfort, M. A., Benoit, F., Chery, G., Charlotin, M. C., & Noland, G. S. (2023). Evaluating a community engagement model for malaria elimination in Haiti: lessons from the community health council project (2019–2021). *Malaria Journal*, *22*(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12936-023-04471-z

Che, C. F., & Mbah, M. (2021). Social Solidarity Economy and Village-centric Development in North-West Cameroon. *International Journal of Community and Social Development*, *3*(2), 126–144. https://doi.org/10.1177/25166026211015474

Clarke, A., Castillo Cifuentes, V., & Ordonez-Ponce, E. (2023). Partnership Structure and Partner Outcomes: A Comparative Study of Large Community Sustainability Cross-Sector Partnerships in Montreal, Barcelona and Gwangju. *Sustainability*, *15*(20), 14734. https://doi.org/10.3390/su152014734

Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research (Fourth Edt.). In *Sage Publications: Vol. Fourth Edi*.

Dani, A., & Mu'aimanah, U. (2024). Optimalisasi Perpustakaan Desa untuk Meningkatkan Literasi Pendidikan di Desa Kreo Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, *4*(1), 185–192. https://doi.org/10.54082/jamsi.1070

Denzin, N. K. (2017). *Sociological Methods: A Sourcebook* (1st ed.). Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315129945

Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research Published by : Academy of Management Stable. *The Academy of Management Review*, *14*(4), 532–550.

Griffis, M. R., & Johnson, C. A. (2014). Social capital and inclusion in rural public libraries: A qualitative approach. *Journal of Librarianship and Information Science*, *46*(2), 96–109. https://doi.org/10.1177/0961000612470277

Heather D Hutto, M. B. W. (2023). *Tribal and rural digital inclusivity: An examination of broadband access in two neighboring Great Plains states*.

Heuertz, L. (2009). *Rural libraries building communities*. University of Washington.

Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *9*(4), 100159. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159

Ife, J. (2010). Capacity Building and Community Development. *Challenging Capacity Building*, 67–84. https://doi.org/10.1057/9780230298057_4

Jun, F. (2020). Digital Literacy in Chinese Young People's Engagement on Weibo. *Beijing International Review of Education*, *2*(3), 420–434. https://doi.org/10.1163/25902539-00203008

Lund, B. D., Agbaji, D. A., & Teel, Z. A. (2023). Information Literacy, Data Literacy, Privacy Literacy, and Chatgpt: Technology Literacies Align With Perspectives on Emerging Technology Adoption Within Communities. *Human Technology*, *19*(2), 163–177. https://doi.org/10.14254/1795-6889.2023.19-2.2

Lutfiyana, K. N., Rohmah, N., Rozaq, A., Rohman, N., & Manan, M. A. (2022). Pendampingan Otomasi Pengelolaan Perpustakaan Desa Pancur Berbasis SLiMS 9 Bulian. *Jurnal Abdimas*, *26*(2), 122–127. https://doi.org/10.15294/abdimas.v26i2.29591

Murray, A., Kotha, S., & Fisher, G. (2020). Community-based resource mobilization: How entrepreneurs acquire resources from distributed non-professionals via crowdfunding. *Organization Science*, *31*(4), 960–989. https://doi.org/10.1287/orsc.2019.1339

Park, J., Zou, S., & Soulard, J. (2024). Transforming rural communities through tourism development: an examination of empowerment and disempowerment processes. *Journal of Sustainable Tourism*, *32*(4), 835–855. https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2178446

Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: Evidence from Indonesia's Village fund program. *PLoS ONE*, *18*(6 June), 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041

Sejie, G. A., & Mahomed, O. H. (2023). Potential facilitators and inhibitors to the implementation and sustainability of the community-based tuberculosis care interventions. A case study from Moshupa, Botswana. *PLoS ONE*, *18*(8 August), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290010

Sharma, S., Marinova, D., & Bogueva, D. (2020). Transitioning to better primary education: The role of an expatriate organisation in India. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(16). https://doi.org/10.3390/su12166489

Sutarno. (2008). *Membina perpustakaan desa*. Sagung Seto.

Veselicz, A., Pénzes, J., & Patkós, C. (2022). Decentralised Funding Activities of the Leader Local Action Groups of the North Hungarian Region from a Governancepoint of View. *European Countryside*, *14*(2), 217–231. https://doi.org/10.2478/euco-2022-0011

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods* (3rd ed., V). Sage Publication.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods* (Sixth Edit). SAGE Publications.

Yunas, N. S., Mochammad Fauzi Said, Abdul Aziz SR, & Huda, M. (2025). Transformational leadership and catalytic collaboration in village development: Study in Mojokerto, East Java, Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, *14*(2), 108–113. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v14i2.3921

Zhang, X., & Zhang, Z. (2020). How do smart villages become a way to achieve sustainable development in rural areas? Smart village planning and practices in China. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(24), 1–20. https://doi.org/10.3390/su122410510